

Asing di Tanah Kelahiran: Pergulatan Identitas Pengungsi Bali - Timor Timur Pasca Orde Baru

I PUTU HENDRA MAS MARTAYANA

Universitas Pendidikan Ganesha
Email: hendra.iputu@yahoo.co.id

Abstract

The article discusses the ambiguity regarding the identity of ex-East Timorese transmigrant who have returned to Bali. These were people who had migrated to Bali since the 1980s and who have decided to return to their land of origin after the Act of Free Choice referendum had opted for East Timorese independence. During the return of the ex-East Timorese refugees, Bali was undergoing a process of cultural reification. The height of which was pushed by the first Bali bombing in 2002 which heralded the rise of the 'ajeg Bali' or Bali first movement. This was the result of the polemics that had arisen amongst organic intellectual thinkers.

Keywords:

Bali; East
Timor;
identity,
post-New
Order

Abstrak

Tulisan ini bertujuan memotret ambiguitas identitas pengungsi Bali yang berstatus eks transmigran Timor-Timur pasca Orde Baru. Mereka adalah orang-orang Bali yang bertransmigrasi ke Timor Timur sejak tahun 1980-an. Namun, Pepera yang memenangkan kelompok Pro Kemerdekaan mengakibatkan ribuan orang mengungsi termasuk orang-orang Bali yang memutuskan kembali ke tanah kelahiran. Di saat yang bersamaan dengan kedatangan pengungsi Bali esk transmigran Timor Timur, Bali pasca Orde Baru sedang mengalami reifikasi kebudayaan. Puncaknya pasca Peristiwa Bom Bali I di tahun 2002 yang menghasilkan kemasan budaya "ajeg Bali". Satu kemasan budaya yang dihasilkan dari polemik pemikiran kaum intelektual organik yang nampak dekat dengan orang Bali dari golongan tertentu, tetapi asing bagi yang lainnya.

Kata Kunci:

Bali; identitas,
pasca Orde
Baru; Timor-
Timur

Pengantar

Tulisan ini mencermati tentang pergulatan identitas para pengungsi Timor-Timur asal Bali pasca Orde Baru. Tema ini dipilih karena periode 1999 merupakan tahun yang memuat peristiwa penting bagi perjalanan sejarah Bali kontemporer pasca keruntuhan Orde Baru. Pengungsi Timor-Timur asal Bali yang termasuk di dalamnya eks transmigran petani kemudian hadir sebagai “orang asing” ketika Bali sedang bertransisi dalam rangka pengonsepan ulang tentang ke-Bali-an. Mereka adalah orang-orang Bali yang menjadi transmigran petani di Timor-Timur periode 1980-an hingga 1990-an. Konflik sosial dan politik yang berakhir dengan kemenangan kelompok Pro-Kemerdekaan memaksa orang-orang Bali perantauan ini kembali ke tanah kelahiran.

Tema-tema yang berkaitan dengan etnisitas di Bali yang secara khusus membicarakan polemik budaya pada struktur sosial masyarakatnya tidak banyak dilirik oleh sejarawan lokal. Hal ini dianggap bidang sosiologi, antropologi atau kajian budaya. Akibatnya, tidak banyak dihasilkan historiografi lokal Bali yang membahas tentang dinamika kebudayaan orang Bali yang secara spesifik membahas artikulasi identitas. Oleh karena itu, ide tulisan ini menggunakan liyanisasi pengungsi Bali eks transmigran Timor-Timor untuk menelanjangi fenomena reifikasi kebudayaan Bali. Dengan kata lain, kajian ini tidak saja memberikan sumbangsih bagi pengembangan konsep-konsep artikulasi identitas orang Bali dan bagaimana mereka memandang dirinya dan orang atau kelompok di luarnya, tetapi juga mengisi celah intelektual yang mungkin saja tidak terakomodasi atau absen di dalam penelitian terdahulu.

Konstruksi identitas kebalian pada momen reifikasi kebudayaan yang bertepatan dengan kepulangan eks transmigran Bali Timor Timur pasca Orde Baru bersifat cair sekaligus berwajah ganda. Cair sebab tidak hanya memperlihatkan segregasi terhadap artikulasi kebudayaan, melainkan juga menunjukkan maalah jejak-jejak permusuhan dan pilihan politik di masa lalu yang tetap dipelihara dan dimunculkan pada suatu kesempatan untuk meliyankan kelompok lain. Berwajah ganda sebab polemik kebudayaan yang berlangsung secara terus menerus pada wilayah pinggiran (baca: Bali Barat) akan selalu berusaha dibungkam demi menghindari noktah hitam pada citra suci dan baik dari Bali Selatan sentris dengan industri pariwisata sebagai ikonnya.

Jika selama ini kajian-kajian akademis banyak menggarisbawahi konstruksi identitas orang Bali dalam kaitannya dengan wacana mencari Bali yang asli dari kalangan intelektual organik thus intelektual tradisional, sehingga muncul kesan bahwa citra Bali yang ditonjolkan selama ini adalah cara pandang Bali Selatan sentris. Akibatnya, ruang Bali “lain” tidak mendapat tempat atau absen dalam mendiskusikan konstruksi identitas dalam struktur



SIBUK-Ratusan transmigran dan warga lainnya yang mengungsi dari Timor tiba di Pelabuhan Benoa, Jumat (17/9) dinihari kemarin tampak sibuk menurunkan barang yang berhasil mereka bawa.

Figur 1. Ratusan Transmigran Bali Timor-Timur Tiba di Pelabuhan Benoa. Sumber: *Bali Post*, Jumat, 17 September 1999, hlm. 2.

masyarakat Bali yang heterogen. Dengan kata lain, kajian ini menjadi antitesis dari wacana Bali Selatan sentris yang telah dengan sengaja melakukan praktik pemujaan terhadap citra Bali yang suci dan tentram. Tulisan ini tidak saja menawarkan perspektif alternatif dalam memahami identitas orang-orang Bali diaspora yang merasa asing dengan dinamika kebudayaan di tanah kelahiran, melainkan juga menjadi matra baru dalam memahami kompleksitas identitas sosiokultural orang Bali dalam dimensi sejarah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, tulisan ini berusaha menjawab pertanyaan pokok, mengapa muncul penolakan terhadap eks transmigran Bali Timor-Timur di tanah kelahirannya pasca Orde Baru ?. Periode yang dipakai mencakup beberapa peristiwa

penting pasca Orde Baru yang menandai fenomena *cultural shock* pada masyarakat Bali. Satu tahun setelah Orde Baru *collaps*, beberapa peristiwa penting terjadi. *Pertama*, eksodus ribuan pengungsi Timor Timur termasuk orang-orang Bali perantau ke tanah kelahiran. *Kedua*, di daerah asalnya, Bali perantau ini berhadapan dengan tiga situasi yang menandai dimulainya artikulasi identitas tentang bagaimana orang Bali memperlakukan dirinya dan orang lain yakni peristiwa Amuk Massa pada bulan Oktober 1999, penguatan suprastruktur lokal, dan dilematisasi adat *vis a vis* dengan agama. Cakupan wilayah penulisan adalah Bali secara umum dengan spesialisasi penelitian di kawasan Bali Barat.

Menemukan Identitas

Sub bab ini membahas tentang konseptualisasi identitas dari para teoritis sosial. Selanjutnya, teori itu coba digunakan untuk membaca dan memahami liyanisasi terhadap Bali perantau dalam konteks dinamika kebudayaan Bali pasca Orde Baru.

Stuart Hall menyatakan bahwa identitas adalah proses yang terbentuk melalui sistem bawah sadar. Sistem bawah sadar berjalan melalui waktu dan membentuk bayangan imajiner yang tidak pernah menemui titik akhir. Kesimpulannya, identitas adalah sesuatu yang berproses (*becoming*) daripada nilai baku yang *taken for granted* (Hall dan Du Guy, 2003: 1-17). Pendekatan Hall sangat membantu dalam menjelaskan fenomena identitas sebagai sesuatu yang cair dan terus berubah. Alih-alih bersikap demokratis dan toleran terhadap kebudayaan yang dinamis, purifikasi dan otentifikasi kebudayaan



Keluarga eks transmigran Timtim asal Bali menunggu janji.

Figur 2. Keluarga Eks Transmigran Bali-Timor-Timur Menunggu Janji. Sumber: *Bali Post*, Jumat 29 Oktober 1999, hlm. 7.

Bali pasca Orde Baru terjebak pada otoritarianisme budaya. Selanjutnya, penyeragaman kebalian oleh kelompok dominan diperkuat oleh kepemilikan pengetahuan, sumber daya ekonomi dan akses terhadap informasi. Akibatnya, jangankan perantau Bali yang dianggap kelompok pecundang dan teralienasi di tanah kelahiran, kelompok pinggiran yang selama ini berfungsi sebagai oposisi atau penyeimbang ikut di(ter)bungkam oleh pengarusutamaan kelompok dominan seiring dengan dukungan transisi politik.

Manuel Castells menawarkan pengertian bahwa identitas itu tidak tunggal dan bersifat jamak. Salah satu cara pandang untuk memaknai proses pembentukan identitas adalah apa yang disebutnya sebagai resistensi atau *resistance identity* - proses bertahannya identitas sebagai bentuk perlawanan atau dalam hal ini dihasilkan oleh mereka yang sedang dalam posisi yang lemah karena stigma dari pihak yang mendominasi dan biasanya digunakan lebih mengarah kepada kegunaan politik identitas (Castells, 2010: 6-8).

Stella Ting-Toomey menawarkan teori negosiasi. Menurutnya, identitas atau konsep diri reflektif dipandang sebagai mekanisme eksplanatori bagi proses komunikasi antarbudaya. Identitas dipandang sebagai citra diri reflektif yang dikonstruksi, dialami, dan dikomunikasikan oleh para individu dalam satu budaya dan dalam satu situasi interaksi tertentu (Toomey, 1999: 25-26). Giddens (dalam Jones, 2010: 251) telah membantu dengan teori strukturasi yang menyatakan bahwa identitas seseorang tidak dapat ditemukan dalam perilaku, maupun dalam reaksi orang lain, tetapi pada kemampuan untuk menjaga akan narasi tertentu (Giddens, 2009: 104; 2004: 48).

Gabungan pendekatan yang digagas oleh Castells, Toomey dan Giddens

membantu menjelaskan bahwa kelompok pemenang dalam arena kontestasi memiliki otoritas menuliskan masa lalunya sebagai Sejarah. Bahkan, Sejarah itu digunakan untuk meniadakan eksistensi kelompok pecundang. Mereka hanya memiliki dua pilihan, mati karena idealisme atau pragmatis melalui usaha adaptif terhadap indikator kebudayaan yang berperan menghasilkan intimasi kekitaan daripada memperlebar jarak dengan kemerekaan. Pada konteks Bali perantau, adaptasi itu hadir dalam bentuk akomodasi terhadap indikator kebudayaan agar menghasilkan drajat penerimaan yang utuh.

Amuk Massa dan Pergulatan Identitas

Konstruksi identitas Bali perantau yang kembali ke tanah kelahirannya menunjukkan gejala keterasingan yang tidak saja disebabkan oleh artikulasi sosial masyarakat Bali yang sedang mengalami reifikasi kebudayaan, melainkan juga transisi politik yang turut memperkuat stigma “liyan”. Transisi politik itu mencakup peralihan atau penjungkirbalikan dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh kelompok anti Orde Baru kepada kelompok pro Orde Baru. Artinya, ada upaya untuk menihilkan eksistensi Golkar sebagai perpanjangan tangan Orde Baru dan atau representasinya yang tengah mengalami dekadensi kekuasaan pasca lengsernya Soeharto. Sub bab ini akan memotret tentang kekerasan verbal dan psikis yang diterima pengungsi Bali eks transmigran Timor Timur pada peristiwa Amuk Massa Oktober 1999 sebagai konsekuensi atas perbedaan pilihan politik di masa lalu.

Peristiwa Amuk Massa Bali 21 Oktober 1999 melumpuhkan tiga kawasan Bali, yakni Bali Utara (Kabupaten Buleleng), Bali Selatan (Kabupaten Badung), dan Bali Barat (Kabupaten Jembrana). Amuk Massa 1999 dianggap sebagai puncak kekecewaan orang Bali terhadap kondisi sosial politik pasca Orde Baru. Pemicunya adalah kekalahan Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden pertama sejak keruntuhan rezim Orde Baru (Springle, 2004: 183-184).

Amuk Massa 1999 tidak berdiri sebagai kejadian tunggal, melainkan ada beberapa peristiwa yang mendahului. Satu tahun sebelumnya, 15 Oktober 1998, masyarakat Bali dikejutkan oleh pernyataan SARA dari Menteri Pangan dan Holtikultura, A.M Saefudin di era pemerintahan B.J Habibie. Ia menyatakan bahwa pencalonan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia dianggap tidak layak dan menyebutnya mewakili “orang Hindu” yang minoritas di tengah negara dimana penduduk mayoritasnya Islam. Pernyataan SARA dari seorang menteri di atas telah memicu sentimen agama dan suku di Bali. Akibatnya gelombang demonstrasi besar-besaran terjadi hingga di penghujung bulan Oktober 1998 (Nordholt, 2007: 394).

Pada peristiwa Amuk Massa 1999, pengungsi Bali eks transmigran Timor Timur merupakan salah satu pihak yang dirugikan baik secara verbal maupun psikis. Alasannya klise, bahwa pengungsi Bali eks transmigran

Timor Timur dianggap produk kebijakan Orde Baru. Prasangka ini muncul karena sebelum bertransmigrasi ke Timor Timur, mereka pernah mengikuti Program Transmigrasi Petani Teladan era 1980-an hingga 1990-an. Hubungan ini dengan sangat mudah menghasilkan stigma afiliasi politik dengan Orde Baru. Di periode yang sama yakni era 1980-an hingga 1990-an, di Bali sendiri tengah berlangsung Golkarisasi, atau kadang disebut juga kuningisasi (Lewis, 2009: 209-210). Tujuannya tidak lain adalah melakukan disorientasi sekaligus distorsi terhadap warisan pemikiran Bung Karno yang dianggap masih bercokol kuat pada memori kolektif orang Bali.

Di beberapa kawasan di Bali dengan kultur politik yang heterogen namun didominasi oleh kekuatan PNI, Golkarisasi dilakukan secara massif dan berdarah-darah (Hitchcock & Dharma Putra, 2007: 70-73). Akibatnya bisa dibayangkan, dendam sejarah melingkar yang melibatkan pilihan-pilihan politik di masa lalu. Peristiwa Amuk Massa dengan demikian adalah letupan kulminasi yang berupaya melakukan degolkarisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang selama Orde Baru berkuasa selalu diintimidasi *thus* ter subordinasi. Jadi, meski pengungsi Bali eks transmigran Timor Timur mengalami kegoncangan budaya dengan dinamika tanah kelahirannya, kedekatan-kedekatan emosional birokratis dengan Orde Baru di masa lalu cukup menjadi preferensi bagi munculnya sentimen politik, sosial dan atau kebudayaan.

Jika kekerasan verbal didapatkan melalui lontaran kata-kata kasar dari demonstran pada peristiwa Amuk Massa, kekerasan psikis yang berdimensi politik dan kebudayaan terjadi pada wilayah adat. Pengungsi Bali yang sebagian besar beragama Hindu ditolak masuk keanggotaan desa adat. Alasannya sama dengan kekerasan verbal yang didapat saat peristiwa Amuk Massa bahwa pengungsi Bali memiliki hubungan genealogis dengan Orde Baru. Pada konteks ini kita bisa menyimpulkan bahwa kultur politik yang dibangun Orde Baru tidak hanya bersifat formal yang menempatkan desa dinas sebagai perpanjangan tangan, melainkan juga bersifat populis yang memposisikan desa adat sebagai lembaga kebudayaan yang ditaati orang Bali dan dianggap mampu memobilisasi massa secara efektif (Bali Post, 5 Juli 2003). Meski kemudian hubungan antara desa adat dan desa dinas di Bali terlihat harmonis, namun sebenarnya mengandung interaksi kultural yang ambigu. Eksistensi keduanya bahkan lebih sering menghasilkan bara daripada cahaya (Bali Post, 28 Juni 2003).

Di samping itu, desa adat menjadi supremasi keberhasilan Orde Baru melakukan infiltrasi politik sampai kelompok terkecil di dalam struktur masyarakat Bali, yakni keluarga (Parimarta, Jurnal Tantular, 2 Oktober 2004: 150). Desa adat juga sering dijadikan sebagai legitimasi kultural untuk memuluskan proyek-proyek pariwisata yang sedang bertumbuh di era 1980-an (Astiti, 2010: 2).



PARA PENGUNSI. Sedang mendapat penjelasan dari pejabat.

Figur 3. Para esk Transmigran Bali – Timor-Timur Mendapatkan Penjelasan dari Pejabat Berwenang. Sumber: *Nusa Bali*, Senin, 1 Januari 2000, hlm. 3.

Ketidakhadiran negara yang diwujudkan dengan kegamangan birokrasi dan nir perlindungan sosial, ditambah rasa permusuhan diametral yang bersifat politis ideologis pada masyarakat Bali menyebabkan pengungsi Bali eks transmigran Timor Timur hidup dalam kepapaan. Sebelum memutuskan bertransmigrasi ke Timor-Timur mereka telah menjual semua sumber daya ekonomi yang dimiliki. Keikutsertaan program transmigrasi didorong oleh mimpi untuk bisa melakukan mobilitas sosial sehingga mampu mengubah status sosial di tanah kelahiran kelak. (Kisid, wawancara, 3 Maret 2013). Namun saat kembali ke tanah kelahiran, jangankan modal ekonomi, modal kultural pun tidak. Dengan segera, kondisi buruk ini menyebabkan pengungsi Bali sebagai kelompok nir peradaban di tengah kontestasi politik kebudayaan Bali yang terus berubah.

Tanah dan Hubungan Kekerabatan

Alih-alih menjadi modal kultural yang merekatkan hubungan kekerabatan, modal genealogis pengungsi Bali dengan sanak keluarga di tanah kelahiran tidak mampu mengintegrasikan mereka ke dalam struktur masyarakat adat. Sebaliknya, menjadi polemik kebudayaan bagi munculnya upaya penolakan dan kekerasan verbal. Hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial bahwa pengungsi Bali eks transmigran Timor Timur dilihat sebagai entitas yang tidak memiliki *bargaining power* baik secara politis, sosial, kebudayaan *cum*

ekonomi dalam konteks masyarakat Bali yang sedang bertransformasi.

Merujuk pada masalah itu, kepemilikan atas tanah menjadi alternatif yang mampu menjawab berbagai persoalan di atas. Berbicara tentang tanah berarti juga berbicara tentang eksistensi diri. Ada gagasan-gagasan simbolik kultural atau barangkali lebih tepat disebut sosio-religius yang tersangkut-paut di dalamnya. Tanah bagi orang Bali adalah simbol ibu yang dipandang bukan semata-mata pemberi berkah kemakmuran melainkan juga tempat untuk meminta perlindungan dan kekuatan (Palguna, Bali Post, 3 November 1997).

Di luar itu, tanah juga merupakan mata rantai penting hubungan kekerabatan dalam struktur kemasyarakatan Bali, yang karenanya lantas menjadikannya semacam alat bukti identitas diri khususnya dalam hal penentuan hak dan kewajiban dalam kerangka struktur tadi. Oleh karena itu, pemutusan ikatan orang Bali dengan tanahnya juga berarti tindakan mencabuti identitas (kedudukan dan fungsi) orang Bali dari ikatan kekerabatannya. Padahal, segi-segi kekerabatan itu ikut punya andil dalam kebudayaan Bali (Sirtha, 2008: 3).

Membayangkan Bali sebagai identitas kebudayaan berarti pemanfaatan tanah dalam alam pikiran orang Bali selalu dimulai dari perhitungan *niskalanya* terlebih dahulu baru kemudian bisa ditentukan peruntukan *sekalanya*. Jadi sebagai benda ekonomis pun, bagi orang Bali, tanah tidak pernah merupakan variabel bebas. Sekali ia diperlakukan sebagai variabel bebas (melulu ekonomi), hal itu bisa untuk sebagian bahkan sudah menimbulkan proses pemiskinan structural (Nordholt, 1986: 3).

Penutup

Terputusnya ikatan genealogis menimbulkan polemik berantai bagi pengungsi Bali yang pulang ke tanah kelahiran. Luluhnya ikatan emosional dengan tanah kelahiran, yang bergenerasi-generasi telah memberikan penghidupan dan kehidupan telah mengakibatkan benturan psikologis. Jika benturan-benturan itu terakumulasi baik kuantitatif maupun kualitatif, biaya sosial tinggal menunggu waktu menjadi ledakan sosial.

Terutama para petani yang mendominasi pengungsi Bali selalu beranggapan *point of no return*, artinya saat di mana kita tidak ada kemungkinan lagi untuk berbalik. Dalam keadaan demikian, ada sebuah frasa kalimat yang bisa jadi menakutkan yakni "*sepalanan tohin mati*" (sekalian dibela dengan taruhan nyawa). Objek yang dibela sampai mati itu adalah tanah. Realitas sejarah dimana tanah mendapatkan pembelaan sampai tetes darah penghabisan dapat disaksikan pada peristiwa puputan yang mengajarkan pada kita bahwa pada titik tertentu kata-kata tidak lagi berguna.

Dengan demikian, tanah tidak saja berfungsi sebagai senjata perlawanan untuk menunjukkan dirinya memiliki hak atas tanah kelahirannya walaupun

mereka tidak hadir dalam kontestasi masa lalu yang menyeret Bali dalam perang saudara tetapi juga ruang untuk mengorganisasi diri, mengekspresikan kebudayaan dan yang paling terpenting adalah membantu pembentukan identitas kebalian.

Daftar Pustaka

- Astiti, Tjok Istri Putra. 2010. *Desa Adat Menggugat dan Digugat*. Denpasar: Udayana University Press.
- Bali Post, "Bali tak Perlu Punya Desa Dinas", Sabtu Kliwon 28 Juni 2003 hal 3.
- Bali Post, "Desa Dinas Masih Efektif", Sabtu Paing, 5 Juli 2003 hal. 5
- Castell, Manuel. 2010. *The Information Age: Economy, Society and Culture; The Power of Identity*. United Kingdom; Blackwell Publishing Ltd.
- Giddens, Anthony. 2009. *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan; Masa Depan Politik Radikal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Giddens, Anthony. 2010. *Konsekuensi-Konsekuensi Modernitas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Hall, Stuart. 2003. "Who Need Identity" dalam Stuart Hall & Paul du Guy (ed), *Question of Cultural Identity*. London; Sage Publition.
- Hitchcock, Mitchael and I Nyoman Dharma Putra. 2007. *Tourism, Development and Terorism in Bali*. USA: Ashgate Publishing Company.
- Jones, Pip. 2010. *Pengantar Teori-Teori Sosial; Dari Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Obor.
- Nordholt, Henk Scholte. 2007. "Bali an Open Fortress" dalam *Renegotiating Boundaries Local Politics in Post Suharto Indonesia* (Henk Scholte Nordholt dan Garry van Klinken (ed)), Leiden: KITLV Press.
- Nordholt, Henk Scholte. 1986. *Bali Colonial Conceptions and Political Change 1700-1940; From Shifting Hierarchies to Fixed Order*. Rotterdam: Casp 15.
- Lewis, Jeff and Belinda Lewis. *Bali Silent Crisis Desire, Tragedy and Transition*. USA: Lexington Books.
- Palguna, Dewa dalam *Bali Post*, "Tanah Untuk Rakyat": Menghitung Masa Depan Orang Bali". 3 November 1997., hal 9.
- Parimartha, I Gede. 2004. *Desa Adat, Desa Dinas dan otonomi Daerah Suatu Tinjauan Historis dalam Tantular*; Jurnal Ilmu Sejarah *Purna Bakti* Drs. Ida Bagus Sidemen. S.U. Denpasar: Fakultas Ilmu Sastra Udayana.
- Republika, "AM Saefudin Sindri Megawati, Warga Bali Tersinggung", 15 Oktober 1998 hal. 2.
- Springle, Robert. 2004. *A Short History of Bali Indonesia's Hindu Realm*. Singapore: Allen and Unwin.
- Surpha, I Wayan. 2004. *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Toomey, Stella Ting. 1999. *Communicating Accros Cultural*. USA: Guilford Press.
- Warren. Carrol. 2010. "Adat Dalam Praktik dan Wacana Orang Bali: Memposisikan Prinsip Kewargaan dan Kesejahteraan Bersama (Commonweal)" dalam Jamie Davidson Dkk (ed), *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jakarta: Obor.
- Wijaya, Nyoman. 2000. *Amuk Massa Bali 20-21 Oktober 1999*. Denpasar: Forum Independen Pemantau Pembangunan Bali (FIP2B), Forum Penyadaran Dharma